

Presiden Dorong Solidaritas dan Kerja Sama Global Tangani Pandemi pada KTT Informal APEC

Sumber : <https://kominfo.go.id/content/detail/35775/presiden-dorong-solidaritas-dan-kerja-sama-global-tangani-pandemi-pada-ktt-informal-apec/0/berita>



Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo menyerukan pentingnya solidaritas dan kerja sama antarnegara di dunia untuk bersama-sama melawan pandemi Covid-19. Presiden juga menggarisbawahi pentingnya dunia memastikan upaya vaksinasi global, termasuk memperkecil kesenjangan vaksinasi.

Hal tersebut menjadi salah satu poin penting yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Informal Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang digelar secara virtual, dari Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/07/2021).

Presiden juga menyampaikan bahwa saat ini kesenjangan vaksinasi di dunia masih cukup lebar. Kesenjangan ini dicontohkan oleh Presiden dengan data bahwa penyuntikkan dosis vaksin di kawasan ASEAN baru mencapai 17,63 persen dari populasi, di kawasan Afrika baru 4,3 persen dari populasi. Sementara di kawasan Amerika Utara dan Eropa masing-masing sebesar 77,73 persen dan 76,81 persen dari total populasi.

“Dalam kaitan ini, Presiden mengharapkan APEC dapat berkontribusi untuk menutup ketimpangan vaksinasi global, termasuk melalui berbagi dosis lewat Covax Facility,” ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya di Istana Negara, Jakarta, selepas mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut.

Presiden mengingatkan bahwa pertimbangan epidemiologis harus selalu menjadi dasar utama dan bukan pertimbangan pengaruh politik, termasuk dalam isu vaksin ini. Presiden juga menyampaikan di dalam pidatonya bahwa APEC harus mendorong peningkatan produksi vaksin global.

“Terdapat beberapa strategi yang harus dilakukan, yaitu diversifikasi produksi vaksin ke negara berkembang, eliminasi hambatan perdagangan terkait bahan baku vaksin, kemudian dukungan terhadap TRIPS *waiver* untuk mengatasi pandemi, dan alih teknologi vaksin terkini,” beber Menlu.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa pemulihan ekonomi mustahil dilakukan bila pandemi belum berakhir. Untuk itu, pemulihan kesehatan harus didahulukan sehingga perang melawan Covid-19 bisa segera dimenangkan.

Dalam konteks nasional, Presiden Jokowi menjelaskan mengenai kebijakan utama yang diambil oleh pemerintah Indonesia saat ini, antara lain kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh Jawa dan Bali, serta kota-kota yang mengalami lonjakan kasus. Selain itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan upaya penguatan layanan kesehatan,

termasuk membangun rumah sakit darurat, upaya mencukupi kebutuhan oksigen dan obat-obatan, serta percepatan vaksinasi nasional.

“Di dalam konteks vaksin, Presiden menyampaikan bahwa saat ini sudah lebih 55 juta dosis vaksin telah disuntikkan di Indonesia dan akan terus diakselerasi vaksinasi di Indonesia. Sejauh ini, Indonesia telah menerima 142.973.880 dosis vaksin baik dalam bentuk curah maupun dalam bentuk vaksin jadi,” ungkap Menlu.

Presiden Jokowi mengakhiri pidatonya dengan menyampaikan bahwa tantangan dunia ke depan masih berat dan harus diatasi bersama.

“Hanya dengan solidaritas dan kerja sama dunia akan mampu keluar dari pandemi dan mampu bangkit bersama,” ungkap Menlu mengakhiri pernyataannya.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut mendampingi Presiden saat mengikuti pertemuan tersebut menjelaskan bahwa KTT informal ini digagas Selandia Baru untuk membahas penanganan pandemi. KTT APEC sendiri biasanya dilakukan setahun sekali di sekitar bulan November sebagai bagian dari rangkaian APEC Economic Leaders Week.

“Situasi pandemi saat ini, Selandia Baru menggagas sebuah KTT tambahan khusus untuk membahas kolaborasi APEC dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi kawasan,” kata Menlu Retno dalam keterangannya selepas pertemuan.

Dalam KTT informal tersebut hadir juga Managing Director IMF Kristalina Georgieva dan Executive Director of Health Emergencies Programme WHO, Michael Ryan. Dalam pernyataannya, IMF dan WHO menyebut bahwa situasi dunia masih penuh dengan tantangan baik dari sisi kesehatan maupun sisi ekonomi.

“Setelah tahun lalu mengalami pertumbuhan yang minus, maka proyeksi pertumbuhan dunia untuk tahun 2021 diperkirakan 6 persen. Namun, pertumbuhan tersebut tentunya akan dipengaruhi situasi pandemi ke depan.

Masalah akses vaksin bagi semua negara mendapatkan perhatian dari dua pembicara dan *do it together* serta *time of solidarity* ditekankan oleh kedua pembicara tersebut,” jelas Menlu.

Dalam seminggu terakhir ini, jumlah kasus Covid-19 di tingkat global meningkat sekitar 15 persen. Direktur Jenderal WHO menyampaikan bahwa dunia sedang menghadapi peningkatan angka kasus dan kematian dalam empat minggu terakhir. Beberapa ekonomi APEC bahkan menghadapi kenaikan kasus lebih dari 100 persen.

Menlu Retno menuturkan bahwa APEC sejauh ini telah menyepakati sejumlah komitmen terkait penanganan pandemi dan percepatan pemulihan ekonomi, yaitu deklarasi untuk memfasilitasi pergerakan barang esensial di masa pandemi yang dikeluarkan pada tahun 2020. Sementara pada tahun 2021, APEC mengeluarkan pernyataan bersama untuk memfasilitasi sektor jasa yang mendukung pergerakan barang esensial dan pernyataan bersama untuk mempercepat WTO Trade Facilitation Agreement untuk mendukung kelancaran rantai pasok vaksin Covid-19 dan barang terkait lainnya.

KTG APEC kali ini juga menghasilkan dokumen Pernyataan Pemimpin Ekonomi APEC: Mengatasi Covid-19 dan Mempercepat Pemulihan Ekonomi. Hal-hal penting dari dokumen tersebut antara lain kerja sama untuk mendorong akses yang berkeadilan yang merata untuk vaksin Covid-19, pentingnya pembukaan lapangan kerja baru dan pemulihan ekonomi inklusif, reformasi struktural untuk mendukung adaptasi pekerja dan sektor pelaku bisnis termasuk lewat transformasi digital, serta perdagangan, investasi, dan integrasi ekonomi kawasan untuk mendorong pemulihan ekonomi.

Selain didampingi Menteri Luar Negeri, dalam pertemuan tersebut Presiden Joko Widodo juga turut didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.